

Focus Group Discussion (FGD) Pelaku UMKM Kabupaten Penajam Paser Utara

Casmudi¹, Sugianto²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Balikpapan
casmudi@uniba-bpn.ac.id

ABSTRACT; *The post-covid-19 pandemic era and the use of digitalization in the industrial era 4.0 forced Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to immediately rise up, pursuing adjustments to today's business. Strong business construction is characterized by high competitiveness. The development of the Nusantara Capital City (IKN) has become a trigger for the birth of awareness among MSME players to seize market opportunities in the Penajam Paser Utara (PPU) region. The fear of losing competition among business actors from outside the region is one of the important triggering factors. Anxiety, not knowing which way to compete with other MSME actors, so that the presence of the FGD is the initial stage for MSME actors to look for a pattern of solutions to plan their business to strengthen competitiveness. Implementation of Community Service (PkM) takes the theme of FGDs for MSME actors at PPU, preceded by requests for creative economic communities, supporting universities and PPU district governments and the business world, as well as preparation of FGD materials such as (1) identifying problems with MSME actors, and (2) strategy the concept of accelerating adaptation along with the development of IKN. Exposure of the material as the direction of the FGD. The presentation of the resource person was assisted by a moderator and responder from the Head of the Trade, Cooperative and MSME Office. The results of PkM show that MSME actors need professional guidance and assistance from universities. The conclusions from this PkM activity include: (1) identifying problems requiring provision, knowledge, and skills in analyzing MSME management, (2) a comprehensive understanding of business management as a provision for managing its distinctive products, and (3) speed of adaptation starting from business planning and Feasibility Studies Business (SKB).*

Keywords: *FGD, MEMEs, Nusantara Capital, Coaching*

ABSTRAK; Era pascapandemi covid-19 dan pemanfaatan digitalisasi pada era industri 4.0 memaksa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) segera bangkit, mengejar penyesuaian kepada bisnis masa kini. Kontruksi usaha yang kuat bercirikan kemampuan berdaya saing tinggi. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pemicu lahirnya kesadaran pelaku UMKM untuk merebut peluang pasar di wilayah Kapupaten Penajam Paser Utara (PPU). Takut kalah bersaing antarsesama pelaku usaha dari luar daerah merupakan salah satu faktor penting pemicunya. Kecemasan, ketidaktahuan arah kemana harus bersaing

dengan pelaku UMKM lain, sehingga hadirnya FGD merupakan tahap awal pelaku UMKM mencari pola solusi merencanakan usahanya menguatkan berdaya saing. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengambil tema FGD pelaku UMKM di PPU, didahului permohonan komunitas ekomonomi kreatif, *supporting* Perguruan Tinggi dan Pemerintah Kabupaten PPU dan dunia usaha, serta penyiapan materi FGD seperti (1) identifikasi masalah pelaku UMKM, serta (2) strategi konsep percepatan beradaptasi seiring pembangunan IKN.

Pemaparan bahan sebagai arah FGD. Pemaparan narasumber dibantu seorang moderator dan penanggap dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Hasil PkM menunjukkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan *guidance* dan pendamping profesional dari Perguruan Tinggi (PT). Adapun kesimpulan dari kegiatan PkM ini diantaranya: (1) mengidentifikasi masalah membutuhkan pembekalan, pengetahuan, serta keterampilan menganalisis manajemen UMKM, (2) pemahaman komprehensif manajemen bisnis sebagai bekal mengelola produk khususnya, dan (3) kecepatan beradaptasi dimulai dari perencanaan bisnis dan Studi Kelayakan Bisnis (SKB).

Kata Kunci: FGD, UMKM, IKN, Pembinaan

PENDAHULUAN

Kata “prospektif” tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia online edisi kelima bermakna dapat (mungkin) terjadi; ada harapan (baik), (Kemendikbud, 2022). Harapan besar dikumandangkan semua pihak termasuk di dalamnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Harapan lebih baik tentu tidak berlebihan seakan-akan pelaku usaha sudah demikian lelahnya menunggu kapan terjadinya perbaikan ekonomi bisa kembali berjalan ke arah yang lebih baik. Sejak pandemic covid-19, sebagian Usaha Mikro Kecil (UMK) saat ini sedang mengalami kontraksi mengarah kepada kebangkrutan. UMK masih merasakan belum sembuh dari dahsyatnya masa pandemi hingga nyaris menghentikan sebagian besar unit usahanya. Perlahan namun pasti, menurunnya angka kematian sebagai akibat dari covid-19 menjadi perhatian serius pemerintah sebagai salah satu faktor progres penanganan harapan perbaikan ekonomi nampak berjalan baik dan terukur. Kondisi yang demikian itu dinantikan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jumlah UMKK di kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 berjumlah 2.163 pelaku usaha, ditetapkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat sebagai stimulan akibat pandemi covid-19. Dikatakan bahwa bantuan sosial tersebut bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang akan

diberikan kepada pelaku usaha terdampak covid-19. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang belum menerima bantuan sosial 2,4 juta pada 2020 lalu (Admin, 2021). Sementara itu, jumlah UMKM mendominasi usaha di Indonesia. Bersumber dari Data Kemenkop UKM menunjukkan dari sekitar 64 juta jumlah usaha di Indonesia, 99,9% diantaranya berbentuk UMKM dan 98,6% berbentuk mikro. UMKM menjadi penyumbang PDB Nasional sebesar 60,34%, serta menyerap 97% total tenaga kerja nasional. Dengan porsi yang sedemikian besar, kejatuhan UMKM akan meningkatkan kemiskinan serta memperlebar jurang ketimpangan antara masyarakat miskin dan menengah/kaya (Hadiyanto, 2022).

Kondisi pelaku ekonomi yang begitu dominan menempati usaha formal dan nonformal itu, pada sisi lain sangat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi perekonomian negara di tengah belum pulihnya masa pandemi covid19 saat ini. Kondisi UMKM saat ini sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ditambah dengan kenaikan bahan bakar minyak BBM yang sangat menggoncang perekonomian masyarakat pada level bawah. Kondisi ini dirasakan masyarakat Kabupaten Panajaem Paser Utara (PPU) yakni dampak dari gonjanganjng kenaikan BBM ini dikeluhkan sangat mendasar karena harga-harga barang kebutuhan lainnya terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan para pekerja di sektor swasta maupun pegawai negeri juga tidak mengalami kenaikan. Sudah barang tentu kondisi ini akan mendorong inflasi dan dampaknya akan menyulitkan para pekerja pada kelompok informal yang juga ikut terlibat dalam kelompok UMKM itu sendiri. World Bank dan Bappenas (2020) melaporkan pada bulan Oktober 2020, yaitu 75% usaha mengalami penurunan omzet selama pandemi, 43% responden melakukan penurunan biaya tenaga kerja, dan 22% kesulitan membayar pinjaman (Hadiyanto, 2022)

Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi UMKM dapat dikelompokkan menjadi (1) Produksi terhambat 18,83%, (2) distribusi terhambat 20%, (3) permintaan pasar menurun menjadi 22%, (4) akses permodalan 19,39, dan (5) kesulitan bahan baku 18,87% (Hadiyanto, 2022). Selanjutnya, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa angka inflasi mulai bulan Oktober 2022 sebesar 5,71%, November 5,42%, dan Desember 2022 angka inflasi sebesar 5,51% (<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/datainflasi.aspx>). Gambaran inflasi rata-rata tersebut 5% selama triwulan akhir tahun 2022 tentu berdampak kepada kondisi iklim usaha bagi UMK yang semakin shock, ditambah lagi dibayangi resesi ekonomi global tahun 2023.

Para pelaku UMK lokal sebagai menanggapi serius karena berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai akibat naiknya BBM yang ditetapkan pemerintah.

Keberadaan UMKM di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berlangsung ratusan tahun lalu sebelum negara ini merdeka. Pada awalnya tidak secara eksplisit bidang kementerian pada tingkat pusat dan dinas pada pemerintah daerah yang secara tegas menaungi UMKM ini. Usaha yang berlandaskan kerakyatan memang pemerintah telah menaunginya dengan wadah koperasi Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: a) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, b) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Perkembangan dari lahirnya Undang-undang Perkoperasian nomor 25 Tahun 1992 kemudian tahun 1993. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja (Sumantri, 2017).

Perubahan wadah kelembagaan baru bagi UMKM tentu menghadapi serangkaian persoalan masalah serius terkait dengan tata kelola baik dari aspek kelembagaannya di wadah yang disediakan pemerintah pusat dan daerah, maupun masalah pada unit-unit UMKM itu sendiri. Aspek-aspek yang mempengaruhinya yaitu (1) kepribadian, dipengaruhi: sikap dan tingkah laku, seperti tingkat pendidikan, adanya bakat dan minat seseorang dalam membuka usaha., (2) motivasi, juga dipengaruhi tingkat kemampuan ekonomi, gaya hidup dan nilai-nilai budaya yang dianutnya selain adanya tekanan pihak eksternal yang mempengaruhi persepsi individu, serta (3) fasilitas dan pertumbuhan ditunjang oleh adanya fasilitas memadai (Sumantri, 2017).

Permasalahan UMKM yang begitu pelik, mengingat keberadaannya tidak sedikit dikuasai oleh inisiatif individu-individu perorangan. Untuk itu dalam perjalanannya pemilik UMKM perlu menggunakan landasan prinsip-prinsip seperti: (1) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, (2)

mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, (3) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, (4) peningkatan daya saing UMKM, (5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. (Sumantri, 2017). Sementara itu dalam menghadapi tantangan UMKM bahwasanya hal yang paling mendasar adalah membangun dan membentuk jiwa dan potensi entrepreneurship karena bila tidak memiliki jiwa dan potensi entrepreneurship maka semangat dan motivasi untuk menjadi wirausaha sulit untuk dikembangkan. Selain itu, pengenalan dan penggunaan teknologi informasi yang sudah masuk pada era digitalisasi menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM (Marlinah, 2020).

Pendampingan serta pembinaan terhadap jiwa pelaku UMKM untuk memiliki jiwa entrepreneurship yang kuat menjadi masalah bersama di tengah-tengah pelaku UMKM yang sedang menghadapi persaingan tajam dan harus bangkit dari keterpurukan pandemi covid-19 saat ini. Merujuk kepada data Bank Indonesia (2015), kendala eksternal yang dialami oleh UMKM meliputi iklim usaha, infrastruktur, dan akses. Kendalakendala yang dihadapi oleh UMKM, baik internal maupun eksternal, hendaknya dibantu oleh pemerintah agar UMKM yang ada dapat berkembang dan bersaing dengan lebih baik. Menurut laporan kajian Bank Indonesia tersebut dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu: (1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima, (2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya, (3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor., dan (4) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar (Bank Indonesia, 2015).

Pelaku UMKM juga memerlukan pendamping yang berasal dari individu yang telah berpengalaman di bidang usaha yang sama. Tujuannya tak lain agar menghasilkan UMKM yang tangguh dan mandiri. (Yazfenedi, 2018). Pendampingan secara individual memungkinkan pelaku UMKM sukses dengan menganut pola rumusan: $\text{Human Factor} \times \text{God Factor} = \text{SUKSES}$. Pandangan solusi mengatasi bersama permasalahan para pelaku UMKM di Indonesia seperti pendampingan yang merupakan solusi tepat untuk menjawab kendala modal maupun kendala SDM, hingga peningkatan skill SDM untuk menciptakan produk yang berdaya saing. Pola pendampingan diyakni efektif membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi UMKM. Adapun rumusan yang digunakan: $\text{BE} \times \text{DO} \times \text{God Factor} = \text{SUKSES}$.

Dimana BE itu terdiri dari 5 komponen yaitu: (1) Impian, (2) Yakin, (3) Syukur, (4) Pasrah, dan (5) Doa (Sanjaya, 2021).

Pendampingan juga digaungkan oleh peneliti lainnya. Pendampingan UMKM juga akan berjalan efektif apabila analisis kebutuhan dilakukan dan kurikulum pendampingan mengikuti standar UMKM naik kelas juga memiliki beberapa perguruan tinggi yang menyediakan jasa pendampingan. (Suryanto & Junaidi, 2022). Dari aspek pemangku kebijakan seperti pemerintah telah melakukan serangkaian upaya penting dalam menguatkan, membangkitkan gairah UMKM untuk mengalami kenaikan kelas yang lebih tinggi. Data dari Bank Indonesia 2015, menyelenggarakan pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan kode kebijakan (SI-APIK), kebijakan ini melibatkan 1.299 individu pelaku UMKM dengan anggaran 179,9 Miliar Rupiah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan kegiatan fokus kepada industri rumahan dengan melibatkan 3.764 orang perempuan yang memiliki usaha mikro. Program ini menelan biaya 5,4 Miliar Rupiah. (Indonesia T. K., 2021). UMKM memiliki peran penting dalam menuntaskan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama untuk menstimulus inovasi, kreativitas, serta menciptakan pekerjaan layak bagi semua. Secara khusus, SDGs merumuskan Tujuan 8 (target nomor 3) dan Tujuan 9 (target nomor 3) untuk memperkuat UMKM melalui perbaikan akses ke pelayanan keuangan. Catatan penting dari keberhasilan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 50%. (Indonesia T. K., 2021).

Upaya para pemangku kebijakan tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, namun lembaga -lembaga lain seperti Kominfo dan Wantiknas (Dewan Teknologi dan Informasi Nasional) dalam upaya percepatan penguatan perekonomian nasional dari sudut UMKM dengan melakukan pendampingan. Wantiknas menyoroti adanya kenaikan transaksi ecommerce yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2021 sebesar U\$53 miliar (Sungkari, 2022).

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diantaranya untuk mendeskripsikan prespektif mengenal masalah dan solusi UMKM serta pemilihan formulasi strategi menyongsong pembangunan IKN. Adapun kerangka berpikir permasalahan UMKM dan solusinya tergambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir PkM

METODE PENELITIAN

Alur teknis pelaksanaan PkM di Kantor Bupati PPU sebagai berikut.



Gambar 2. Alur Teknis Pelaksanaan PkM

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada 30 Agustus 2022 bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Jl. Provinsi KM 09 Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam. Acara dimulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WITA.

Kegiatan PkM mengundang lebih kurang 70 peserta. Mereka adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam klatser kehadirannya rata-rata mereka ini adalah pelaku usaha pemula dalam kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bidangbidang usaha yang mereka tekuni adalah industri skala rumahan yang mempersiapkan diri untuk pusat oleh oleh Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku dan beberapa sentra oleh-oleh di daerah Kecamatan Waru, Babulu, dan Penajam.

Ragam industri kreatif yang mereka kerjakan diantaranya kain batik, kain sarung, songkok khas suku Paser, piala, gantungan kunci khas PPU, aneka camilan khas PPU, kripik usus, makaroni berbagai rasa, Dampo Durian., Amplang Bandeng, Wisato, Tas Rotan, cimicimi aneka rasa, gula merah, jengkol khas Penajam, Pisang Gapit, keripik tempe kriuk, aneka dodol buah, sate payau (kijang), dan berbagai pelaku UMKM kuliner lainnya.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini mengundang (1) Plt. Bupati Penajam Paser Utara bapak Hamdan, (2) Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, (3) Kepala Dinas Pariwisata, (4) Ketua Penggerak PKK Kabupaten Penajam Paser Utara, serta (5) Perwakilan Kepala SMA dan SMK di lingkungan Penajam Paser Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agenda kegiatan dibuka oleh pembawa acara Mas Rizal (Perwakilan UMKM Ekonomi Kreatif PPU), dilanjutkan dengan pembacaan do'a, kemudian laporan ketua penyelenggara ibu Indrayani, S.Pd., M.Pd. dilanjutkan sambutan dan arahan bapak Bupati Penajam Paser Utara H. Hamdan.

Setelah itu, masuk acara inti pemaparan narasumber tentang deskripsi keberhasilan negara lain dan daerah mengangkat UMKM setempat. Pemaparan inti kegiatan PkM mengenai perspektif mengenal masalah dan solusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PkM ini membahas beberapa hal krusial yang dihadapi UMKM di Penajam Paser Utara. Misalnya saja, dipaparkan oleh Muhamad Reza Rahman. Kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator, seperti kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, serta terbatasnya pemasaran.



Gambar 3. Paparan Masalah Rencana UMKM

Pemaparan persoalan perencanaan usaha selalu mengemuka, karena terdapatnya persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas; paparan lanjutan dari bapak Mochamad Reza Rahman. Selanjutnya, menurut hasil kajian Bank Indonesia (BI), masalah yang dihadapi pelaku UMKM diantaranya (1) produksi dan distribusi terhambat, (2) akses permodalan, (3) kesulitan bahan baku, serta (4) penurunan penjualan. Permasalahan tersebut dijawab dengan menerbitkan paket kebijakan seperti (1) bantuan langsung tunai, (2) bantuan permodalan tanpa agunan, serta (3) pembiayaan mulai usaha.

Skema kebijakannya: (1) pembiayaan ultra mikro kredit yaitu pembiayaan untuk level mikro paling bawah yang belum mendapatkan pelayanan dari bank dan mendapatkan pembiayaan dari lembaga non perbankan sebagai pelaksananya, (2) Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan sasaran kepada kelompok perempuan miskin yang memiliki usaha mikro (RI, 2022).

Pemilihan formulasi strategi menyongsong pembangunan IKN bagi UMKM di Kabupaten PPU: 1) perencanaan usaha sebagai pilihan strategi awal memulai bisnis. Pentingnya perencanaan memegang peranan krusial terdepan. Aspek-aspek ini menjadi satu fakta kelemahan di kalangan pelaku UMKM di daerah, termasuk di Balikpapan dan PPU (Casmudi, 2021).



Gambar 4. Fakta-fakta Perencanaan



Gambar 5. Peta Jalan Ide Usaha dengan Perencanaan Minim

Berdasarkan paparan grafik tersebut memberikan gambaran dalam memulai usaha, dalam Bahasa Jawa “bondo” istilah awam “bondo nekat” (modalnya cuma nekat, tanpa dilandasi keilmuan yang mencukupi) memegang kendali 40%, serta dari studi banding terdapat 60%. Dari kondisi ini cukup lumayan pengalaman yang dibangun atas-fakta-fakta dari pelaku usaha

yang lain kemudian diyakni dapat ditiru untuk dibuka usaha miliknya menjadi tren model pada era sekarang ini.



Gambar 6. Narasumber (Kiri), Bupati Kab. PPU (Tengah), dan Ketua Panitia (Kanan)

Pelaku UMKM walaupun lambat, wajib memahami dengan baik pengetahuan dan keterampilan Studi Kelayakan Bisnis (SKB). Dengan pemahaman praktis tentang SKB, pemilik usaha akan menjalankan usahanya dengan fokus dan menggunakan pedoman kendali yang jelas. Dengan berpedoman pada manajemen operasionalnya, pelaku UMKM akan mudah menarik kesimpulan mengenai pertumbuhan dan hambatan-hambatan usahanya. Dengan menggunakan konsep ini, pemilik UMKM akan mudah mengenali potensi risiko yang berujung kepada kerugian usaha.

Pendampingan dari ahli yang berpengalaman dalam dunia bisnis UMKM dapat menjadi alternatif pilihan UMKM baik melalui komunitas maupun atas prakarsa program yang dimotori oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM serta Dinas Pariwisata. Pemilihan strategi ini dapat juga menggunakan model strategi inkubasi bisnis sebagai strategi prioritas hasil analisis dengan AHP, digitalisasi bisnis, dan program Pro-UMKM.

Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna dijadikan fokus pada program yang menjadi prioritasnya. Dari aspek-aspek variabel yang dianalisis itu, tentu ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang ditemukan (Nuraharto, 2022).

Sebagai wadah pelaku UMKM beredar kesepakatan dalam forum yaitu pendirian Sentra UMKM. Sentra UMKM atau sering dikenal Paguyuban yaitu suatu titik kumpulnya komunitas pelaku UMKM yang terbentuk dari inisiatif pelaku usaha yang bermukim di kawasan tersebut baik secara sengaja atau tidak sengaja, mengingat adanya kepentingan bersama, nasib yang sama, serta ingin maju bersama.

Sentra UMKM formal yaitu suatu komunitas pelaku UMKM yang terbentuk melalui otoritas yang berwenang baik dari pemerintahan, organisasi masyarakat (yayasan) atau diprakarsai oleh lembaga lain. Proses terbentuk dan tujuannya tentu berbeda dengan yang bersifat informal, karena sentra UMKM ini diprakarsai lebih dulu sedangkan yang menempati dapat datang belakangan atau merelokasi dari tempat lain, agar keberadaan sentra UMKM dapat memberi nilai tambah sekaligus untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat setempat yang produktif dan mandiri.

Sentra UMKM mandiri yaitu suatu komunitas pelaku UMKM yang terbentuk melalui proses mandiri, tidak ada pihak yang menginisiasi dengan sengaja tetapi keberadaannya telah membentuk identitas diri sebagai sentra UMKM, karena secara fisik telah membentuk suatu kawasan usaha yang dihuni oleh komunitas UMKM, namun secara sadar masyarakat tidak membentuk sentra UMKM, oleh karena itu sentra UMKM mandiri harus diarahkan menjadi sentra UMKM yang bersifat informal agar memberi manfaat bagi pelaku UMKM yang berada pada kawasan tersebut, memiliki format organisasi sehingga dapat mengurus berbagai kepentingannya terutama yang terkait dengan kepentingan pihak luar komunitas (Handini, 2019).

Inti pembahas ini bersumber dari tiga hal, yaitu identifikasi masalah yang dihadapi UMKM setempat, pemilihan formulasi strategi menyongsong pembangunan IKN bagi UMKM di Kabupaten PPU, dan strategi pendampingan pelaku UMKM.

Penelusuran kepada pokok-pokok masalah bagi UMKM dilakukan dengan wawancara informal sebelum acara PkM ini diselenggarakan. Wawancara juga berhubungan dengan tema permasalahan UMKM di Kota Balikpapan. Antara pelaku UMKM di kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara memiliki karakteristik yang sama. Kota Balikpapan sebagai kota yang sudah berkonsentrasi sebagai kota jasa dan industri sudah diikuti kesiapan para pelaku UMKM sebelum ada keputusan kebijakan Pemerintah Pusat yang menempatkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Karakteristik UMKM di Penajam Paser Utara tidak sedikit dari asal-usulnya adalah warga yang berdomisili di kota Balikpapan dan mengembangkan usahanya di kabupaten Penajam Paser Utara sebagai langkah pengembangan usaha menyongsong IKN. Kekerabatan warga kota Balikpapan dan warga kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjaln lama karena wilayah Penajam Paser Utara sebelum pemekaran menjadi pemerintah otonom kabupaten era tahun 80-an hingga 90-an menjadi bagian wilayah kota Balikpapan disebut Kecamatan Balikpapan Seberang.

Fokus kepada identifikasi masalah yang dihadapi UMKM di PPU, apa yang ditemukan pelaksana PkM sebelumnya di Balikpapan, bahwa perencanaan usaha sebagai bagian krusial dari fungsi manajemen usaha, masih lemah dan cenderung diabaikan oleh pelaku usaha pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya adalah soal pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan akan manajemen yang masih rendah. Lebih dalam akar masalahnya, bahwa usaha yang dibukanya dimulai dari suatu coba-coba untuk mengisi waktu, dan sebagian diantaranya karena adanya tekad karena terpaksa sebagai pendatang yang membutuhkan penghidupan yang layak, maka lahirlah usaha-usaha itu.

Mengenal dengan dekat akan *body knowledge* usaha sendiri sangat penting, namun kembali kepada hasil identifikasi masalah UMKM di atas, hal ini masih sulit dilakukan oleh kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK), fokus aktivitasnya adalah pada upaya industri bagaimana menyiapkan bahan tertentu yang dibuat dalam bentuk produk dan bisa laku terjual di pasaran. Aspek produksi dan penjualan menjadi salah satu fokusnya. Karena umumnya dikelola secara perseorangan dimana pelaku dan tenaga kerja produksi dan penjualan ada pada dirinya dan lingkaran keluarga inti, otonom itu menjadi penghalang akan pemahaman mengelola usahanya yang baik dari aspek manajemen usaha.

Memahami untuk memulai usaha dari perencanaan yang matang, ini menjadi hal yang sulit ditemukan di kalangan UMK. Selain argumentasi kunci ada di atas, kesadaran untuk menguatkan visi usahanya ke depan untuk dapat diperhitungkan dengan prediksi yang matang sebagai hal yang sulit diwujudkan oleh mereka. Hal ini menjadi titik awal bahwa memulai usaha belum dibangun dari aspek manajemen yang sebenarnya dibantu dengan manajemen operasi, manajemen strategi, dan manajemen resiko yang memadai. Kerumitan teoritis tampaknya menjadi alasan pokok mengapa mereka enggan untuk melakukan serentetan skema manajemen usaha dengan pola yang benar dan *update*.

Menyusun formula strategi arah jalan yang benar bagi UMKM dimanapun mereka berkiprah dari ciri-ciri permasalahan cenderung berpola sama. Hal yang mungkin berbeda adalah pemicunya, mengapa UMKM itu untuk segera menyadari akan pentingnya memilih strategi yang baik, agar usahanya tampak terukur, terkendali, dan akan tumbuh menjadi usaha yang sehat dengan harapan *profitable*. UMKM di kabupataen PPU, tentu tanpa adanya pemicu proyek IKN belum akan bangun secepat pagi-pagi. Karena faktor internal pelaku UMKM dan lingkungan eksternal memang belum memungkinkan muncul sebagai suatu bentuk usaha bercirikan kemasyarakatan atau berbasis masyarakat yang memiliki nilai prospektif dari tinjauan bisnis.

Kenyataan IKN sebagai pemicu kesadaran para UMKM tertanam itu benar adanya, sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang mereka (pelaku UMKM) di PPU yang tidak hanya ingin menjadi penonton ekonomi di lingkungan sendiri. Ini menjadi satu kata kunci pemicunya. Berangkat dari keterbatasan internal pelaku UMKM dan faktor eksternalnya, maka para pelaku UMKM menyusun suatu wadah komunitas, yang secara bersamaan disambut oleh Pemerintah Kabupaten PPU khususnya Dinas Penrdagangan Koperasi dan UMKM setempat. Kenyataan ini menajdi sebuah momen yang memaksa keadaan para pelaku ekonomi untuk cepat mengikuti perkembangan manajerial bisnis dari berbagai dukungan eksternal baik dunia usaha, lingkungan perguruan tinggi, dan pemerintah (*Triple Helix*).

Adapun strategi pendampingan pelaku UMKM dikarenakan dua alasan. Pertama, hasil FGD baik peserta PkM ditambah dari harapan Kepala DisperindagKop-UMKM PPU, serta dari para peserta sangat membutuhkan model pendampingan agar tidak berjalan sendirisendiri yaitu UMKM yang masih dalam tahap mencoba-coba konsep. Kepala Desa di kecamatan Babulu yang telah lebih dahulu menginisiasi membuka desa wisata, dengan latar belakang hamparan persawahan sebagai aspek kekuatan yang ditawarkan.

Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana produk konsep desa wisata ini bisa bergulir kalau hanya bergantung kepada masyarakat sekitar lokasi, dengan pertimbangan pendapatan asli daerah yang belum begitu menggembirakan. Topik pemasaran desa wisata ini ditujukan kepada narasumber pelaksana PkM ini. Penulis menjawaba secara konstruktif program itu harus dikenal dengan cepat dengan membuat *flyer* menarik untuk disebarluaskan di kalangan sekolah, kampus, hotel, dan berbagai komunitas, termasuk Dinas Pariwisata setempat.

Webside merupakan alat yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menyebarkan hal ini. Dari aspek Pendidikan SMP, SMA, dan SMK sudah melakukan kurikulum merdeka, demikian

juga di Perguruan Tinggi (PT) paket wisata bisa dintegrasikan dalam program praktik *entrepreneurship* bagi kurikulum merdeka. Hal ini menjadi tawaran yang komprehensif dapat dilakukan dengan paket-paket yang terintegrasi.

Untuk mewujudkan hal itu, kegiatan PkM ini merupakan pintu awal yang dapat menjembatani antara kebutuhan UMKM dengan pihak-pihak eksternal dalam berpikir bersama dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat UMKM dan lingkungan masyarakat dimana UMKM itu berdomisili saling membutuhkan untuk kemajuan bersama. Model pendampingan merupakan salah satu pilihan yang tepat agar seluruh UMKM yang termasuk dalam inventarisasi Pemerintah Kabupaten PPU dapat terlayani dengan optimal tentang strategi paling krusial adalah perencanaan bisnis dan studi kelayakan bisnis. Dua hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar bagi UMKM di kabupaten PPU saat ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini menarik kesimpulan bahwa mengacu kepada tujuan pelaksanaan PkM itu sendiri, ada tiga hal sebagai berikut.

1) Identifikasi masalah yang dihadapi UMKM setempat

Kemampuan dalam mengidentifikasi sangat dibutuhkan mengenai dua hal penting yaitu mengenal dengan dekat dinamika UMKM di lapangan. Pengenalan dinamika yang *update* biasanya tim penulis melakukan dengan program magang mahasiswa dan studi pendahuluan bagi mahasiswa yang akan meneliti di bidang UMKM. Dalam pelaksanaan magang, tentu ada pembekalan pembekalan baik konteks teoritis maupun aplikatif. Konteks teoritis dapat disajikan dari berbagai teori dan temuan penelitian tentang UMKM, sedangkan aspek praktis dari temuan laporan magang kewirausahaan. Dua hal itu diramu menjadi bahan yang komprehensif dan ditawarkan kembali lewat penyajian FGD bagi UMKM yang diberikan label “Pendidikan Bagi Pelaku UMKM Kabupaten Penajam Paser Utara”.

2) Pemilihan formulasi strategi menyongsong pembangunan IKN bagi UMKM di Kabupaten PPU

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten PPU menjadi hal pemantik para pelaku UMKM untuk segera berbenah, menyiapkan dirinya masing-masing untuk menyiapkan produknya mampu disajikan pada perhelatan terprogram dengan

otoritas IKN maupun terpisah dengan program serupa. Pengungkit akan keinginan cepat mampu beradaptasi dalam menyajikan, melayani sesuai dengan standarisasi manajemen UMKM harus memberikan arah yang jelas, fokus khususnya kepada perencanaan bisnis dan studi kelayakan bisnis. 3) Strategi pendampingan pelaku UMKM.

Program-program yang dapat dikendalikan dengan terukur rasanya sulit diwujudkan jika program itu hanya menyebar informasi baik tertulis maupun lisan, tanpa difasilitasi dengan *worksheet* yang mengarahkan kepada tujuan kemampuan bagi UMKM dalam menjalankan roda-roda usaha bisnisnya. Pemikiran strategi juga tidak selayaknya ditentukan oleh salah satu pihak saja, tetapi atas permintaan dan akses kebutuhan apa yang krusial bagi UMKM untuk segera dicapai. Pendampingan sabagai salah satu model yang membuka kesempatan semua pihak menjadi model laboratorium bisnis yang terintegrasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM (*Triple Helix*).

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021). Penajam Paser Utama, <https://penajamkab.go.id/?p=2014>.
- Hadiyanto. (2022). *Ekosistem Fiskal Untuk Kebangkitan UMKM*. Jakarta: Majalah Trasury Indonesia.
- Indonesia, Bank. (2015). Retrieved from www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Dokumen/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf diakses, Maret 2023 Pukul 11.55 Wita.
- Indonesia, T. K. (2021). *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: FE Universitas indonesia.
- Kemendikbud. (2022, Desember jumat 30 Desember 2022). *Badan Bahasa Kemendikbud*. Retrieved from kbbi.web.id
- Marlinah, I. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi*, 118-124. Maschasin. (2013). *Pemberdayaan UMKM*. Yogyakarta: De-Publish.
- Mochamad Reza Rahman. (tt). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. Jakarta: FE Universitas Tarumanegara.
- Niode, I. Y. (2009). Sektor UMKM di Idonesia, Profil, masalah dan strategi Pemberdayaan. *Oikos Nomos*, --.

- Nuraharto, K. (2022). *Strategi Pengembangan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa Pandemi Covid 19 di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Kemendagri IPDN.
- RI, T. P. (2022). *Langkah Pemerintah Dukung UMKM*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Sumantri, B., A. (2017). *Manajemen koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*. Kediri: FE Universitas PGRI Kediri.
- Suryanto & Junaidi. (2022). Kajian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Sleman Tahun 2022 (Study of Upgrade MSMEs In Sleman District In 2020). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, 3(2), 127-139
<https://doi.org/10.35912/jakman.v3i2.1039>.